



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD SALEH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 633799

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 368.896.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 3.78 m²/1.1 m² di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/36 m² di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 102.000.000
3. Tanah Seluas 4987 m² di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 39.896.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2004 m²/78 m² di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, WARISAN Rp. 127.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 114.000.000

1. MOTOR, YAMAHA IKP A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 800.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 58.443.652

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 542.139.652



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

542.139.652

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.